

**PENGARUH IPM, PMA, PMDN DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**



Skripsi Oleh :

ADITYA PRATAMA

01021381924091

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraik Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

PALEMBANG

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH IPM, PMA, PMDN DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

Disusun Oleh :

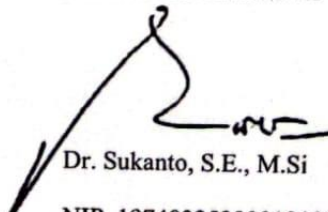
Nama : Aditya Pratama
NIM : 01021481924091
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Regional

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

Tanggal 20 Juni 2023

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PENGARUH IPM, PMA, PMDN DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Disusun Oleh :

Nama : Aditya Pratama
NIM : 01021381924091
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Regional

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 17 Juli 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.


Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 20 Juli 2023

Dosen Pembimbing

Dosen Penguji


Dr. Sukanto, S.E., M.Si

NIP.197403252009121001

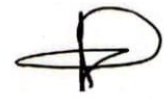

Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si

NIP.197007162008012015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 8-8-2023
FAKULTAS EKONOMI UNSRI


Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP.197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aditya Pratama
NIM : 01021381924091
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Ekonomi Regional
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh IPM, PMA, PMDN dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Pembimbing:

Ketua : Dr. Sukanto, S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 17 Juli 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan selain hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 26 Juli 2023

Pembuat Pernyataan



Aditya Pratama

NIM.01021381924091

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN 8-8-2023
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga Saya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh IPM, PMA, PMDN dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) program Strata Satu (S-1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas sejauh mana variabel indeks pembangunan manusia, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan belanja modal mempengaruhi ketimpangan pembangunan yang terjadi pada antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan regresi data panel. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang membangun demi kepentingan skripsi ini. Berkat bantuan doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak skripsi ini dapat selesai.

Palembang, 11 Juni 2023

Aditya Pratama

NIM.01021381924091

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama berjalannya proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada Saya sehingga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Harun dan Ibu Sumarmi selaku kedua orang tua yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat serta rela berkorban demi kelancaran dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.
3. Azzahra Aliyahputri selaku adik kandung yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Saya.
4. Dr. Sukanto, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan ilmunya untuk dapat membimbing serta memberikan kritik dan saran untuk skripsi Saya.
5. Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk mengui Saya serta membantu memberikan kritik dan saran untuk skripsi Saya.
6. Dr. Suhel, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing akademik selama perkuliahan.
7. Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

8. Seluruh dosen di lingkungan jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan materi dan ilmunya pada saat perkuliahan.
9. Marlin Hendri, Wislawati, Indri Marlia Febriwati dan Idham Syafri Marliansyah selaku saudara Saya yang telah memberikan solusi dan semangat kepada Saya dalam menyusun skripsi ini.
10. Teman-teman jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2019 Palembang dan teman-teman konsentrasi Ekonomi Regional angkatan 2019 yang telah memberikan warna selama proses perkuliahan.

Palembang, 11 Juni 2023

Aditya Pratama

NIM.01021381924091

ABSTRAK

PENGARUH IPM, PMA, PMDN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Oleh :

Aditya Pratama, Sukanto

Ketimpangan antarwilayah menjadi salah satu agenda pembangunan nasional beberapa dekade terakhir ini. Banyak faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh IPM, PMA, PMDN dan Belanja Modal terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan metode *fixed effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam kategori tinggi serta variabel IPM, PMA dan PMDN berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan sedangkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

Kata Kunci : *IPM, PMA, PMDN, Belanja Modal, Ketimpangan Pembangunan*

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP.197304062010121001

Dosen Pembimbing



Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP.197403252009121001

ABSTRACT

THE EFFECT OF HDI, FOREIGN INVESTMENT, DOMESTIC INVESTMENT AND CAPITAL EXPENDITURES ON DEVELOPMENT INEQUALITY BETWEEN DISTRICTS/CITIES IN EAST KALIMANTAN PROVINCE

By:

Aditya Pratama, Sukanto

Inequality between regions has become one of several national development agendas this last decade. Many factors drive inequality between regions. Therefore, this study aims to analyze the effect of HDI, Foreign Investment, Domestic Investment and Capital Expenditures on development inequality between districts/cities in East Kalimantan Province. The data used in this research is panel data. The analysis technique used is panel data regression with the fixed effect model method. The results of the study show that there is an imbalance in development between regions districts/cities in East Kalimantan Province are included in the high category and the HDI variable, Foreign Investment and Domestic Investment have a significant effect on development inequality, meanwhile Capital Expenditure has no significant effect on development inequality.

Keywords : *HDI, Foreign Investment, Domestic Investment, Capital Expenditures, Development Inequality*

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP.197304062010121001

Dosen Pembimbing



Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP.197403252009121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa	: Aditya Pratama		
Jenis Kelamin	: Laki-laki		
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 28 April 2001		
Agama	: Islam		
Status	: Belum Menikah		
Alamat Rumah	: Jl. Oregon III Taman Kebalen Indah blok o1/27 RT003/RW27, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat		
Alamat Email	: adtyaprtm16@gmail.com		
Nomor Telepon	: 0877-6907-3067		
Pendidikan Formal	:		
Sekolah Dasar	: SD Islam Al-Husna Bekasi		
SLTP	: MTsN 1 Kota Bekasi		
SLTA	: MAN 1 Kota Bekasi		
Strata 1 (S1)	: Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya		
Pengalaman Organisasi	:		
2020-2021	: Anggota Department PPSDM Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya		
2020-2021	: Anggota Department PSDM Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya		

2021-2022	: Koordinator Wilayah Palembang Hima Bajaj Universitas Sriwijaya
2021-2022	: Wakil Ketua Department Human Resource Suntree Millennials
2021-2022	: Wakil Ketua Department Human Resource Youthped Indonesia
2021-2022	: Staf Ahli Department Human Resource Youth Miles Indonesia
2021-2022	: Staf Ahli Department Personalia Young Entrepreneur Sriwijaya
Pengalaman Sukarelawan	:
2019-2019	: Hima Bajaj Mengabdi (Desa Sungai Ondok)
2021-2021	: Volunteer Mengelola Emosi Indonesia
2021-2022	: Volunteer Senyum Anak Nusantara

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	16

1.4	Manfaat Penelitian	16
1.4.1	Manfaat Akademis	16
1.4.2	Manfaat Praktis	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN		18
2.1	Landasan Teori.....	18
2.1.1	Teori Pertumbuhan NeoKlasik.....	18
2.1.2	Teori Tabungan serta Investasi Harrod Domar.....	19
2.1.3	Teori Pengeluaran Pemerintah Rostow dan Musgrave	20
2.1.4	Konsep Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah.....	21
2.1.5	Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan.....	21
2.1.6	Konsep Indeks Pembangunan Manusia	22
2.1.7	Konsep Penanaman Modal Asing.....	23
2.1.8	Konsep Penanaman Modal Dalam Negeri	24
2.1.9	Konsep Belanja Modal.....	24
2.1.10	Konsep Indeks Williamson	25
2.2	Hubungan Antar Variabel	26
2.2.1	Hubungan Antara IPM Terhadap Ketimpangan Pembangunan.....	26
2.2.2	Hubungan Antara PMA Terhadap Ketimpangan Pembangunan	27

2.2.3	Hubungan Antara PMDN Terhadap Ketimpangan Pembangunan	28
2.2.4	Hubungan Antara Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pembangunan	28
2.3	Penelitian Terdahulu	29
2.4	Alur Pikir Penelitian	38
2.5	Hipotesis Penelitian	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		41
3.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	41
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	41
3.2.1	Jenis Data	41
3.2.2	Sumber Data.....	42
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	42
3.4	Teknik Analisis	42
3.4.1	Regresi Data Panel	42
3.4.2	Uji Kesuaian Model	45
3.4.3	Uji Pemilihan Model.....	47
3.4.4	Uji Asumsi Klasik.....	48
3.4.5	Uji Signifikan Koefisien	49

3.5	Definisi Variabel Operasional.....	51
3.5.1	Ketimpangan Antar Wilayah	51
3.5.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	51
3.5.3	Penanaman Modal Asing (PMA).....	52
3.5.4	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	52
3.5.5	Belanja Modal.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		54
4.1	Gambaran Umum.....	54
4.1.1	Geografis dan Wilayah.....	54
4.1.2	Perkembangan Indeks Williamson Antar Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.....	56
4.1.3	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Antar Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2022	59
4.1.4	Perkembangan Penanaman Modal Asing Antar Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2022	62
4.1.5	Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri Antar Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2022	65
4.1.6	Perkembangan Belanja Modal Antar Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2022	68

4.2	Hasil Penelitian	70
4.2.1	Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	70
4.2.2	Uji Pemilihan Model.....	72
4.2.3	Uji Asumsi Klasik.....	78
4.2.4	Uji Hipotesis	80
4.3	Pembahasan.....	82
4.3.1	Pengaruh IPM Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	82
4.3.2	Pengaruh PMA Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	87
4.3.3	Pengaruh PMDN Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	90
4.3.4	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.....	94
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	98
5.1	Kesimpulan	98
5.2	Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....		100
LAMPIRAN.....		107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 IPM Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022.....	8
Tabel 1. 2 PMA Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2022...	10
Tabel 1. 3 PMDN Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2022 ..	12
Tabel 1. 4 Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018- 2022.....	14
Tabel 2. 1 Matriks Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 4. 1 Perkembangan Indeks Williamson Antar Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2022	57
Tabel 4. 2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Antar Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2022.....	60
Tabel 4. 3 Perkembangan Penanaman Modal Asing Antar Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2022	63
Tabel 4. 4 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri Antar Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2022.....	66
Tabel 4. 5 Perkembangan Belanja Modal Antar Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2022	69
Tabel 4. 6 Hasil Estimasi <i>Common Effect Model</i> , <i>Fixed Effect Model</i> dan <i>Random Effect Model</i>	71

Tabel 4. 7 Hasil Uji Chow	72
Tabel 4. 8 Hasil Uji Hausman.....	73
Tabel 4. 9 Hasil Regresi Metode <i>Fixed Effect Model</i>	74
Tabel 4. 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	78
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinearitas	79
Tabel 4. 12 Hasil Uji F.....	80
Tabel 4. 13 Hasil Uji t.....	81
Tabel 4. 14 Jumlah Sekolah Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	84
Tabel 4. 15 Jumlah Puskesmas Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	85
Tabel 4. 16 Realisasi Proyek PMA Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	88
Tabel 4. 17 Realisasi PMDN Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	92
Tabel 4. 18 Panjang Jalan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 -2022.....	6
Gambar 2. 1 Kurva U Terbalik Kuznet.....	19
Gambar 2. 2 Alur Pikir Penelitian.....	39
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Regresi Data Panel <i>Common Effect Model</i>	107
Lampiran 2. Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i>	108
Lampiran 3. Hasil Regresi Data Panel <i>Random Effect Model</i>	109
Lampiran 4. Hasil Uji Chow	110
Lampiran 5. Hasil Uji Hausman	111
Lampiran 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	111
Lampiran 7. Hasil Uji Multikolinearitas	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bertujuan guna mewujudkan penduduk adil serta makmur selaras seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selama ini laju pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai indikator dan metode penting untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah secara berkala (Siwu, 2019). Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipisahkan oleh pembangunan ekonomi. Proses pembangunan ekonomi difasilitasi oleh pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya mendorong pembangunan ekonomi.

Dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut terdapat berbagai dampak yang dihasilkan seperti dampak positif dan dampak negatif (Febriyani & Anis, 2021). Dampak positifnya adalah pelaksanaan kegiatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berjalan lebih lancar dan berkesinambungan di suatu daerah. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah ketimpangan pembangunan antar daerah dan pembangunan ekonomi tanpa perencanaan yang matang. Indonesia termasuk bagian dari negara berkembang yang selalu mengupayakan terobosan pembangunan guna meninggikan tingkat kesejahteraan rakyatnya melalui berbagai transformasi atau perubahan ekonomi.

Ketimpangan antar daerah merupakan akibat dari negara-negara yang sedang berkembang yang sedang menjalankan proses pembangunan. Peristiwa tersebut merupakan suatu langkah perubahan atau transformasi yang di hadapi dalam proses pembangunan. Ketimpangan tersebut diakibatkan dari beberapa aspek, antara lain jumlah sumber energi alam yang dimiliki suatu wilayah, perbandingan demografis, ketidakmampuan barang dan jasa untuk bergerak dengan mudah, fokus pelaksanaan ekonomi suatu wilayah serta pembangunan alokasi dana di suatu wilayah. Oleh karena itu, biasanya terdapat beberapa wilayah terbelakang dan beberapa wilayah maju. Menurut Daniel, (2013), perkembangan ekonomi dan kesenjangan ekonomi antar daerah ini secara langsung memberikan efek langsung bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Masyarakat memandang hal ini sebagai bentuk perilaku iri dari ketidakpuasan terhadap kinerja pihak pemerintah yang dapat mempengaruhi ketentraman masyarakat yang akan berujung pada konflik di daerah setempat.

Faktor pertama yang membuat adanya ketimpangan pembangunan adalah kondisi demografis. Lingkup demografis yang dimaksud adalah mencakup tingkat perbedaan kondisi ketenagakerjaan, laju pengembangan serta komponen kependudukan, laju pendidikan serta kesehatan (Silviana & Tallo, 2020). IPM merupakan indikator yang dipakai dalam demografis. *United Nation Development Programme* (UNDP), mengatakan nilai ini mempunyai tiga elemen

kualitas sumber daya manusia antara lain laju pendidikan, taraf kesehatan masyarakat serta daya beli masyarakat.

Pembangunan suatu wilayah dapat dijelaskan berhasil jika wilayah itu mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi dan menaikkan standar hidup masyarakat dengan keseluruhan. Tinggi rendahnya IPM dapat mempengaruhi pertumbuhan efektivitas penduduk. Semakin tinggi IPM akan memiliki pengaruh kepada pertumbuhan efektivitas manusia. Semakin tingginya efektivitas manusia di wilayah itu maka dapat memiliki pengaruh demikian kepada pendapatan masyarakat. Begitu juga pertumbuhan pendapatan, apabila pertumbuhan pendapatan di suatu wilayah tinggi dapat mengakibatkan bertambahnya ketenteraman penduduk yang mengakibatkan turunnya tingkat ketimpangan antar wilayah. Fenomena demikian selaras oleh penemuan yang diteliti Didia, (2016), mengungkapkan kenaikan IPM memiliki pengaruh terhadap turunnya jenjang ketimpangan yang terjadi antar wilayah.

Faktor lain dari demografis terdapat pula faktor investasi. Investasi yang dimaksud adalah Penanaman Modal Asing (PMA) serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi ialah suatu metode yang bisa dicoba penguasa guna menaikkan pertumbuhan ekonomi serta dalam jangka panjang mampu meningkatkan derajat hidup masyarakat. Kebijakan investasi regional menjadi berarti apabila haluan pembangunan wilayah yang digapai adalah kenaikan

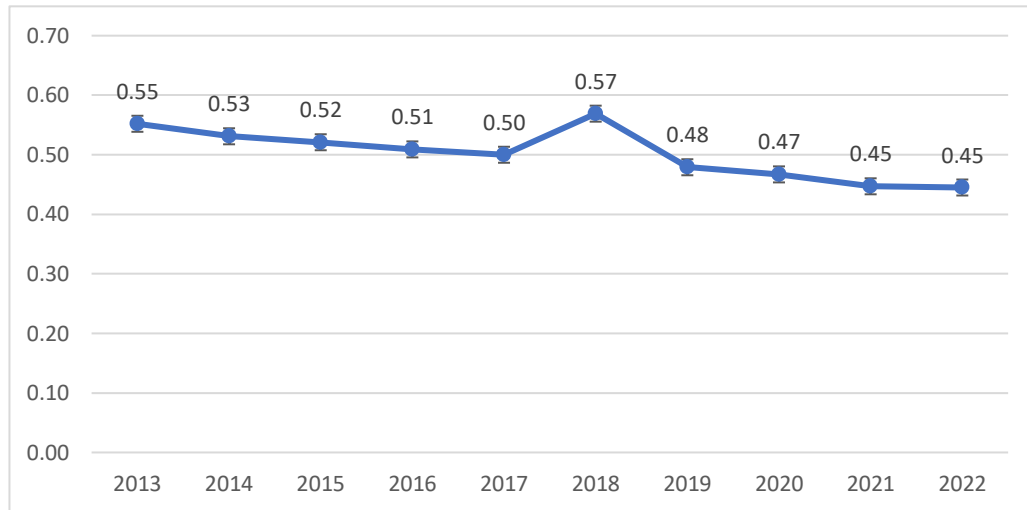
pertumbuhan ekonomi serta pemerataan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Kuatnya efek balik serta melemahnya efek tebar investasi dapat memiliki pengaruh kepada ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal demikian diakibatkan tidak meratanya target investasi di sejumlah provinsi. Pertumbuhan ekonomi melambangkan barometer kesuksesan suatu wilayah dalam melaksanakan pembangunan karenanya proses penerapan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seraya pemerataan capaian pembangunan menjadikan soal unggul yang dijalankan pemerintah guna menurunkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Febriyani & Anis, (2021), mengungkapkan bahwa investasi mempengaruhi penurunan tingkat ketimpangan.

Faktor lain dari investasi adalah faktor alokasi dan pembangunan wilayah yang diantaranya ialah belanja modal. Belanja modal adalah salah satu anggaran pemerintah yang mempunyai fungsi guna menaikkan pertumbuhan ekonomi, kestabilan pembangunan dan menaikkan taraf ketenteraman masyarakat. Keadaan demikian terjadi jika suatu wilayah memiliki distribusi anggaran modal yang kian tinggi sehingga menjadi batu loncatan pertumbuhan ekonomi pada wilayah bersangkutan serta dapat lebih tangkas.

Dana belanja modal yang didistribusikan diharapkan mampu memicu kenaikan pertumbuhan ekonomi yang didampingi penurunan ketimpangan. Keadaan tersebut sejalan dengan penelitian serupa dilakukan Niswah, (2017), mengungkapkan belanja modal yang tidak tersebar rata antar wilayah mengakibatkan ketimpangan tinggi akibat pusat perekonomian hanya terfokus pada wilayah yang mempunyai kesanggupan tinggi akan tetapi wilayah yang tidak mempunyai potensi akan condong memperoleh belanja modal yang lebih rendah yang berdampak terhadap ketimpangan yang terjadi.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, mengungkapkan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa memperoleh atensi serta prioritas dari pemerintah. Kebijakan tersebut tertuang dalam kebijakan pembangunan jangka menengah dalam mempercepat pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu (1) perkembangan hubungan kota juga desa dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. (2) pertumbuhan aktivitas ekonomi pada Kawasan strategis yang kuat kaitannya kepada pemberdayaan masyarakat berlandas kemampuan ekonomi wilayah. (3) pengembangan kawasan perbatasan yang mempunyai hubungan ulet guna menumbuhkan daya saing wilayah dalam mencermati birokrasi. Tetapi setelah segala cara dilancarkan pemerintah dalam menciptakan strategi baru guna memacu pembangunan masih mengalami tingkat ketimpangan yang lumayan tinggi di Provinsi Kalimantan Timur.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 (Data Diolah)

Gambar 1. 1 Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2022

Gambar 1.1 menggambarkan kondisi ketimpangan yang berlangsung di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017 mendapati penurunan akan tetapi pada tahun 2017-2018 mendapati kenaikan tajam yang disebabkan peran lapangan kerja unggul yakni pertambangan juga penggalian serta industri pengolahan mendapati penurunan sama halnya dengan peran lapangan usaha pertanian yang sempat jatuh pada tahun yang sama. Sedangkan tahun 2018-2022 kembali mengalami penurunan. Indeks Williamson pada tahun 2013-2022 yang berlangsung di Provinsi Kalimantan Timur tengah berada di strata tinggi keadaan demikian disebabkan rata-rata nilai Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Timur tengah berada pada nilai 0,5 serta menggambarkan bahwa pembangunan antar wilayah kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur nan masih belum menyeluruh.

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017-2022 menunjukkan ketimpangan wilayah menjadikan topik strategis yang sampai sekarang tengah harus diatasi. Keadaan tersebut tampak dari Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Timur yang masih menunjukkan nilai indeks tinggi maka Provinsi Kalimantan Timur masih belum menunjukkan adanya kestabilan antar wilayah. Disamping itu keadaan sama tampak sebab terdapatnya disparitas pembangunan antar wilayah kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur yang dekat dengan ibu kota provinsi juga Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur yang ada di pelosok. Pembangunan wilayah Kalimantan Timur yang beriringan oleh ibu kota seperti Kota Balikpapan serta Kota Bontang juga yang dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) seperti Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai pembangunan yang kian unggul dibandingkan dengan Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat.

Beralaskan uraian yang menunjukkan peningkatan IPM dapat berpengaruh terhadap turunnya tingkat ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah maka disediakan data IPM kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur sejak masa 2018 sampai 2022.

Tabel 1. 1 IPM Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	IPM (Indeks)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Mahakam Ulu	66,67	67,58	67,09	67,95	68,75
Samarinda	79,93	80,20	80,11	80,76	81,43
Kalimantan Timur	75,83	76,61	72,24	76,88	77,44

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data Diolah), 2022

Tabel 1.1 menjelaskan angka IPM kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2022 yang mendapati kenaikan tahun 2018-2019 tetapi mendapati penyusutan pada tahun 2019-2020. Akan tetapi nilai IPM kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020-2022. Selisih kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Jika dilihat pada mutu sumber daya manusia yang dihitung dengan IPM antar wilayah kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur perbedaan paling mencolok adalah Kota Samarinda yang termasuk dalam kategori tinggi sekaligus tertinggi pada Provinsi Kalimantan Timur dengan rata-rata 80,49. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu termasuk dalam kategori sedang sekaligus terendah di Provinsi Kalimantan Timur dengan rata-rata 67,61. Hal tersebut dikarenakan tingkat perbedaan kondisi ketenagakerjaan, laju pengembangan serta komponen kependudukan, laju pendidikan serta layanan kesehatan antara dua daerah tersebut berbanding terbaik meninjau Kota Samarinda adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu adalah hasil peluasan Kabupaten Kutai Barat yang masih terbilang baru karena dibentuk pada tahun

2013 yang disahkan melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 mengenai pendirian Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Timur yang mendapat hak istimewa serta atensi oleh pemerintah terbukti mempunyai nilai rata-rata IPM yang terdapat dalam kategori tinggi (71 – 80) dengan nilai 75,83 – 77,44. Karena mendapat kenaikan di masing-masing tahunnya sehingga semestinya ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan.

Faktor lain selain IPM yang dapat mengakibatkan ketimpangan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur ialah faktor investasi diantaranya Penanaman Modal Asing (PMA) serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada lazimnya investasi melingkupi eskalasi barang dan jasa di masyarakat semacam pembuatan jalan baru, eskalasi mesin-mesin baru, pembuatan tanah baru dan lain sebagainya. Faktor penentu tingkat investasi dimata investor ialah jenjang keuntungan yang diharapkan bakal didapatkan, suku bunga, harapan seputar keadaan ekonomi pada tempo mendatang, perkembangan teknologi dan penerimaan nasional serta perubahan-perubahan lainnya. Investasi tersebut nantinya diharapkan mampu mengurangi tingkat ketimpangan yang ada.

Tabel 1. 2 PMA Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2022

Kabupaten/Kota	PMA (Miliar)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Mahakam Ulu	11,62	33,52	11,45	0,12	867,2
Samarinda	102,10	21,28	18,80	17,13	18.886,3
Kalimantan Timur	587,50	863,10	378,03	745,19	227.511,1

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data Diolah), 2022

Tabel 1.2 menjelaskan nilai PMA kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2022 yang mendapati pertumbuhan dalam tahun 2018-2019 namun mendapati penurunan dalam tahun 2019-2020. Akan tetapi nilai PMA kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020-2022. Perbedaan kondisi investasi di suatu daerah akan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Jika dilihat dari kondisi investasi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur perbedaan yang paling mencolok adalah Kota Samarinda termasuk dalam kategori tinggi sekaligus tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur dengan rata-rata 3,8 miliar. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu termasuk dalam kategori sedang sekaligus terendah di Provinsi Kalimantan Timur dengan rata-rata 1,8 miliar.

Hal tersebut dikarenakan kecenderungan investor untuk memilih kawasan perkotaan atau kawasan dengan infrastruktur transportasi, jaringan telekomunikasi, tenaga kerja terampil dan jaringan perhubungan antara dua daerah tersebut berbanding terbaik meninjau Kota Samarinda selaku ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu adalah buntut

peluasan dari Kabupaten Kutai Barat yang masih terbilang baru karena dibentuk pada tahun 2013 yang disahkan melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 mengenai pendirian Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Timur yang mendapatkan prioritas dan atensi dari pemerintah mengingat dibangunnya Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami kenaikan investasi di beberapa tahun terakhir maka seharusnya ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan. Keadaan demikian dilangsungkan guna mengejar ketertinggalan Provinsi Kalimantan Timur dari sisi sarana dan prasarana. Beralaskan usaha yang sudah dilangsungkan semestinya ketimpangan di Provinsi Kalimantan Timur berada pada taraf rendah namun keadaan ini malah berlaku sebaliknya, ketimpangan yang berlaku di Provinsi Kalimantan Timur tengah berada dalam taraf tinggi.

Selain itu penanaman modal adalah tindakan pertama guna melangsungkan proses pembangunan. PMA serta PMDN keduanya esensial juga memiliki pengaruh terhadap pemerataan tingkat ketimpangan. Selain itu bukan sekadar pihak swasta yang berusaha saat melaksanakan penanaman modal namun penguasa berpartisipasi didalamnya.

Tabel 1. 3 PMDN Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2022

Kabupaten/Kota	PMDN (Miliar)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kutai Kartanegara	5.416,19	6.305,29	2.284,88	3.319,55	2.961.723,4
Mahakam Ulu	33,83	499,03	508,16	575,50	72605
Kalimantan Timur	25.941,96	22.674,05	25.934,01	30.297,38	8.835.927,9

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data Diolah), 2022

Tabel 1.3 menjelaskan nilai PMDN kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2022 yang mengalami kenaikan pada tahun 2019-2022. Nilai ini sejalan dengan investasi dalam negeri nasional pada tahun 2019-2022 yang mengalami kenaikan sebesar 3.35 persen namun mengalami penurunan pada tahun 2018-2019. Perbedaan kondisi investasi di suatu daerah akan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Jika dilihat dari kondisi investasi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur perbedaan yang paling mencolok adalah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam kategori tinggi sekaligus tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur dengan rata-rata 5,9 miliar Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu termasuk dalam kategori sedang sekaligus terendah di Provinsi Kalimantan Timur dengan rata-rata 1,4 miliar.

Hal tersebut dikarenakan kecenderungan investor untuk memilih kawasan perkotaan atau kawasan dengan infrastruktur transportasi, jaringan telekomunikasi, tenaga kerja terampil dan jaringan perhubungan antara dua daerah tersebut berbanding terbaik mengingat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah yang dijadikan sebagai pusat pembangunan Ibu Kota

Nusantara (IKN) sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu adalah hasil perluasan Kabupaten Kutai Barat yang masih terbilang baru karena dibentuk pada tahun 2013 yang disahkan melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 mengenai pendirian Kabupaten Mahakam Ulu didalam Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Timur yang mendapatkan prioritas dan atensi dari pemerintah mengingat dibangunnya Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami kenaikan investasi di beberapa tahun terakhir maka seharusnya ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan. Keadaan demikian dilangsungkan guna mengejar ketertinggalan Provinsi Kalimantan Timur dari sisi sarana dan prasarana. Jumlah investasi yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yaitu tahun 2019-2022 seharusnya ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun serta membuat Provinsi Kalimantan Timur sebagai kawasan maju juga mampu mensejahterahkan masyarakatnya namun pada kenyatannya ketimpangan yang berlaku di Provinsi Kalimantan Timur masih berada di level tinggi.

Faktor lain yang mampu mempengaruhi ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur ialah belanja modal. Belanja modal semestinya dilangsungkan pemerintah guna pembaruan serta pembangunan sarana dan prasarana yang sudah ada serupa dengan aspek pendidikan, kesehatan dan transportasi. Terdapatnya akomodasi publik dapat

merangsang investor dalam menancapkan asetnya pada wilayah tercantum. Investasi demikian dapat memacu pembangunan serta memangkas tingkat ketimpangan yang terjadi.

Tabel 1. 4 Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Belanja Modal (Miliar)		
	2018	2020	2022
Kutai Kartanegara	593.769.061	1.131.607.579	5.264.007,24
Mahakam Ulu	255.336.526	345.108.548	1.088.401,31
Kalimantan Timur	5.705.828.237	6.410.902.998	24.090.073,57

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data Diolah), 2022

Tabel 1.4 menjelaskan nilai belanja modal kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2022 yang mengalami kenaikan pada tahun 2018-2022. Nilai ini sejalan dengan belanja modal nasional pada tahun 2018-2022 yang mengalami kenaikan sebesar 3.35 persen. Perbedaan kondisi alokasi dan pembangunan daerah di suatu daerah akan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Jika dilihat dari kondisi alokasi dan pembangunan daerah antar wilayah kabupaten/kota pada Provinsi Kalimantan Timur perbedaan yang paling mencolok adalah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam kategori tinggi sekaligus tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur dengan rata-rata 24,5 miliar sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu termasuk dalam kategori sedang sekaligus terendah di Provinsi Kalimantan Timur dengan rata-rata 7,68 miliar.

Pengalokasian belanja modal yang dilangsungkan pemerintah dengan pembangunan serta pembaruan sektor pendidikan, kesehatan juga transportasi dapat merangsang masyarakat untuk lebih giat serta antusias dalam melaksanakan pekerjaan serta dapat menumbuhkan jumlah investasi pada setiap wilayah yang sanggup memacu pembangunan ekonomi akibatnya tingkat ketimpangan yang terjadi kian menurun.

Keadaan tersebut dilangsungkan guna mengejar ketertinggalan Provinsi Kalimantan Timur dari sisi sarana dan prasarana. Beralaskan usaha yang sudah dilangsungkan semestinya ketimpangan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur menurun tetapi keadaan ini malah berlaku sebaliknya, ketimpangan yang berlangsung di Provinsi Kalimantan Timur tengah berada dalam taraf tinggi.

Setiap bangsa termasuk Indonesia menghadapi masalah ketimpangan wilayah yang merupakan masalah yang mendesak. Berdasarkan penjelasan dari alasan yang melatarbelakangi ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur mampu dijelaskan bahwa IPM, PMA, PMDN dan Belanja Modal semuanya berperan penting dalam memangkas tingkat ketimpangan. Akan tetapi pada kenyataannya nilai IPM, PMA, PMDN dan Belanja Modal antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur belum dapat mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh IPM, PMA, PMDN dan Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh IPM, PMA, PMDN dan Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Dapat menjadi acuan dosen ataupun mahasiswa guna meninjau serta mendalami berkenaan dengan rumpun ilmu ekonomi regional yang berkaitan dengan IPM, PMA, PMDN dan Belanja Modal serta faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Dapat menjadi rujukan kepada peneliti dengan konsep sama selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat menjadi tolak ukur pemerintah, lembaga daerah dan pejabat daerah dalam penyusunan kebijakan khususnya terkait ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Dapat menjadi sumber pengetahuan dalam menurunkan taraf ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S., & Wahyudin, A. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Economix*, 5(2).
- Alfiansyah, H., & Budyanra, B. (2020). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1). <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.26>.
- Alfurqani, Z. H., Widiarsih, D., & Algusri, J. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Economics, Accounting, and Business Journal*, 1(1).
- Amaliah, E. N., Darnah, D., & Sifriyani, S. (2020). Regresi Data Panel dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) (Studi Kasus: Persentase. *Journal of Statistics and Its*, 1(2).
- Andhiani, K. D., Erfit, E., & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(1). <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4602>.
- Baransano, M. A., Putri, E. I. K., Achsani, N. A., & Kolopaking, L. M. (2016). Analysis of Factors Affecting Regional Development Disparity in the Province of West Papua. *Journal of Economics and Development Studies*, 4(2).

- Chisti, N. S. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada 6 Provinsi di Pulau Jawa). *Universitas Brawijaya*, 1(2).
- Damayanti, L. (2017). Analisis Dampak Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Regional Pulau Jawa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Daniel, P. A. (2013). Kajian Kesenjangan Pendapatan Provinsi Jambi. *Journal Development*, 1(1). <https://doi.org/10.53978/jd.v1i1.3>.
- Dhyatmika, K. W., & Atmanti, H. D. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(2).
- Didia, K. A. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur. *Economics Development Analysis Journal*, 5(1).
- Didu, S., & Islamiah, N. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 7(1). <https://doi.org/10.35448/jequ.v7i1.4242>.
- Fahmi, M., & Mulyono, Y. O. (2016). Pendidikan, Human Capital atukah Signaling? Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 15(2). <https://doi.org/10.21002/jepi.v15i2.560>.
- Febriyani, A., & Anis, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 3(4).
- Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1).

- Hasanah, U., Ekonomi, I. I.-J. I. M., & 2020, Undefined. (2020). Pembangunan Manusia, Ketimpangan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *jim.unsyiah.ac.id*, 5(1).
- Hidayat, M., & Rahayu, S. (2018). Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau: Pendekatan Regresi Kuadratik. *Jurnal Ekonomi Sakti (JES)*, 7(1).
- Islami, F. S., & SBM, N. (2018). Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 33(1). <https://doi.org/10.24856/mem.v33i1.564>.
- Islamiah., & Rahmatia., paddu., Zamhuri, M. Y. (2021). Intervensi Variabel Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Ekonomika*, 5(April).
- Istiqomah, R. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi (Studi Kasus di Pulau Jawa Tahun 2011-2016). *Jurnal Ilmiah*, 10(05).
- Kurniasih, E. P. (2013). Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian Terhadap Hipotesis Kuznet. *Jurnal Eksos*, 9(1).
- Le, Q. H., Do, Q. A., Pham, H. C., & Nguyen, T. D. (2021). the Impact of Foreign Direct Investment on Income Inequality in Vietnam. *Economies*, 9(1). <https://doi.org/10.3390/economies9010027>.
- Lengkong, S. M. K., Rotinsulu, D. C., & Walewangko, E. N. (2019). Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(2). <https://doi.org/10.35794/jpek.d.15783.19.2.2017>.

- Mansyur, K., Nurisni, & Hamrullah, H. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. *Development Policy and Management Reveiw*, 1(2).
- Naibaho, G. O., Mandei, J. R., & Pangemanan, L. R. J. (2020). Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 16(3). <https://doi.org/10.35791/agrsosek.16.3.2020.31093>.
- Nangarumba, M. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 7(2).
- Niswah, F. (2017). Analisis Pengaruh Variabel Struktur Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Kredit Investasi, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi di Indonesia. *Jurnal ilmiah*.
- Prastiwi, D. H., Laut, L. T., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2014-2018. *Dinamic : Directory Journal of Economic*, 2(1).
- Prastya, H., Gunarto, T., & Ratih, A. (2018). Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1).
- Purba, B., Masbar, R., Maipita, I., & Jamal, A. (2019). The Effect of Capital Expenditure and Gross Fixed Capital Formation on Income Disparity in West Coast Region of North Sumatera. *Iop Conference Series: Earth and Environmental Science*, 260(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/260/1/012022>.

- Putri, N. putu V. S., & Natha, I. K. S. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan. *e-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(1).
- Putri, P. I. (2014). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa. *Jejak Journal of Economics and Policy*, 7(2).
- Rahmawati, F., & Ayu Yuniarti, R. (2020). Analysis of the Effect of Industrial Agglomeration, Economic Growth, Human Development Index (hdi) and Open Unemployment Rate on Regional Inequality in East Java Province. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 22(1).
- Rizki, M. I., & Taqiyyuddin, T. A. (2021). Pemodelan Regresi Spatial Autoregressive Fixed Effect Model Data Panel pada Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. *J Statistika: Jurnal Ilmiah Teori dan Aplikasi Statistika*, 14(1). <https://doi.org/10.36456/jstat.vol14.no1.a3816>.
- Rosmeli. (2015). Dampak Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10(2).
- Setiawan, G. B. K. P., & Budiana, D. N. (2015). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali. *e-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(10).
- Sholihah, F., & Kustanto, M. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo. *Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama "Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global" Malang*.

- Silviana, R., & Tallo, A. J. (2020). Analisis Ketimpangan dan Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Antar (Kabupaten/Kota) di Provinsi Jawa Barat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(3). <https://doi.org/10.37905/aksara.6.3.329-338.2020>.
- Siwu, H. F. D. (2019). Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(3). <https://doi.org/10.35794/jpek.16464.19.3.2017>.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Rajagrafindo.
- Suanes, M. (2016). Foreign Direct Investment and Income Inequality in Latin America: a Sectoral Analysis. *Cepal Review*, 2016(118). <https://doi.org/10.18356/13c68e36-en>.
- Suhendra, I., & Irawati, D. A. (2016). Pengaruh Tabungan, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2). <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4346>.
- Syaripuddin, S., Semmaila, B., & Aminuddin, A. (2021). Pengaruh Aglomerasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sulawesi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1). <https://doi.org/10.33096/paradoks.v4i1.742>.
- Wijayanti, F. A. (2018). Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi, Investasi Asing, Dana Alokasi Umum dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan. *Universitas Islam Indonesia*, VII(4).
- Yasni, R., & Yulianto, H. (2020). Peran Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 4(1). <https://doi.org/10.35837/subs.v4i1.819>.

- Yudistira, M. R., & Sohibien, G. P. D. (2020). Analisis Konvergensi Ekonomi di Pulau Jawa Menggunakan Data Panel Dinamis Spasial Tahun 2013-2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1). <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.66>.
- Yunus, S., & Amirullah. (2019). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Aceh). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2).
- Zusanti, R. D., Sasana, H., & Rusmijati. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Jawa 2010-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(3).